PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)

THE EFFECT OF LOCAL OWN REVENUE, SPECIAL ALLOCATION FUNDS, AND PROFIT SHARING FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES
(Case Studies in Districts/Cities in West Java Province Year 2016-2019)

Muhammad Haris Firdaus[1], Leny Suzan[2], Djusnimar Zultilisna[3]

[1,2,3] Universitas Telkom, Bandung

Mharisfirdaus@student.telkom.ac.id[1], lenysuzan@telkomuniversity.ac.id[2], titi@telkomuniversity.ac.id[3]

Abstrak

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belaja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Badan Pusat Statistik pada tahun 2016-2019. Teknik pemilihan sampel *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh 76 Kabupaten/Kota. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi data panel. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial variabel dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mengurangi biaya-biaya selain Belanja Modal, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan agar dapat mengelola dan memanfaatkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

---

Abstract

Capital Expenditures are regional government expenditures that are useful for more than one fiscal year and will increase regional assets or wealth and will further increase routine expenditures such as operating and maintenance costs. The independent variables in this study are local revenue, special allocation funds and profit-sharing funds. The dependent variable in this study is capital expenditure. This study aims to analyze the effect of local revenue, special allocation funds and profit-sharing funds on capital expenditures in districts/cities in West Java Province. The population in this study is Regency/City in West Java Province which is recorded at the Central Statistics Agency in 2016-2019. The sampling technique was purposive sampling and the samples obtained were 76 districts/cities. The analysis technique used is panel data regression analysis. Simultaneously the variables of local revenue, special allocation funds and profit-sharing funds affect capital expenditures. Partially, the variables of special allocation funds and profit-sharing funds have an effect on capital expenditures. While the regional original income variable has no effect on capital expenditure. So that local governments are expected to reduce costs other than Capital Expenditures, so that they can be utilized by the community. Local governments are also expected to be able to manage and utilize special allocation funds and profit-sharing funds as well as possible to improve the quality of public services and prosper the people.

Keywords: *Capital Expenditure, Regional Original Revenue, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund.*

---

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan menggunakan sumber keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Badan Pusat Statistik. Dipilihnya Jawa Barat sebagai objek penelitian ini adalah karena Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang realisasi Belanja Modalnya mengalami fluktuasi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Menurut [1] perekonomian di Indonesia secara spasial tahun 2018 masih didominasi oleh Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 58,48%, kemudian diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 21,58%, Pulau Kalimantan sebesar 8,20%, Pulau Sulawesi sebesar 6,22% dan sisanya 5,52% di pulau-pulau lainnya. Namun dilihat dari realisasi Belanja Modal, dari keseluruhan Provinsi se Pulau Jawa tahun 2016-2020 Provinsi Jawa Barat realisasi Belanja Modalnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan kesimpulan bahwa realisasi belanja modal Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dibanding dengan Provinsi lainnya. Artinya Provinsi Jawa Barat belum bisa mengelola belanja modalnya dengan baik. Sehingga Provinsi Jawa Barat belum bisa mencapai target atau melebihi anggaran belanja modalnya.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian

2.1.1Teori *Agensi* dan Teori *Signalling*

Menurut [4] teori agensi ada juga masalah keagenan dalam organisasi pemerintah. Rakyat sebagai badan utama dan mempercayakan pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks teori signalling, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk memenuhi tangung jawab kepada masyarakat dan pemerintah yang diatasnya. Pengeluaran daerah adalah kekayaan pemerintah bersangkutan dengan semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang menguranginya [3]. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 rumus belanja modal sebagai berikut ;

BM = BT+BPM+BGB+BJIJ+BATL

Keterangan :

BM	= Belanja Modal
BT	= Belanja Tanah
BPM	= Belanja Peralatan dan Mesin
BGB	= Belanja Gedung dan Bangunan
BJIJ	= Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
BATL	= Belanja Aset Tetap Lainnya

2.1.3 Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keungan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya disebut PAD adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut harus berdasarkan undang undang tersebut.

PAD= PD+RD+HPKDD+LPS

Keterangan:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PD	= Pajak Daerah
RD	= Retribusi Daerah
HPKDD	= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Pasal 1 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.5 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertical antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah Terhadao Belanja Modal

Menurut [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada realisasi potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah.

2.2.2 Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan Daerah berdasarkan [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dana Alokasi Khusus diartikan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.2.3 Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil itu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanakan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Untuk meperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan meperhatihan potensi daerah penghasil merupakan tujuan dari alokasi DBH. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan daerah penghasil pendapatan porsi lebih besar dan daerah lain dalam provinsi yang bersangkutan mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

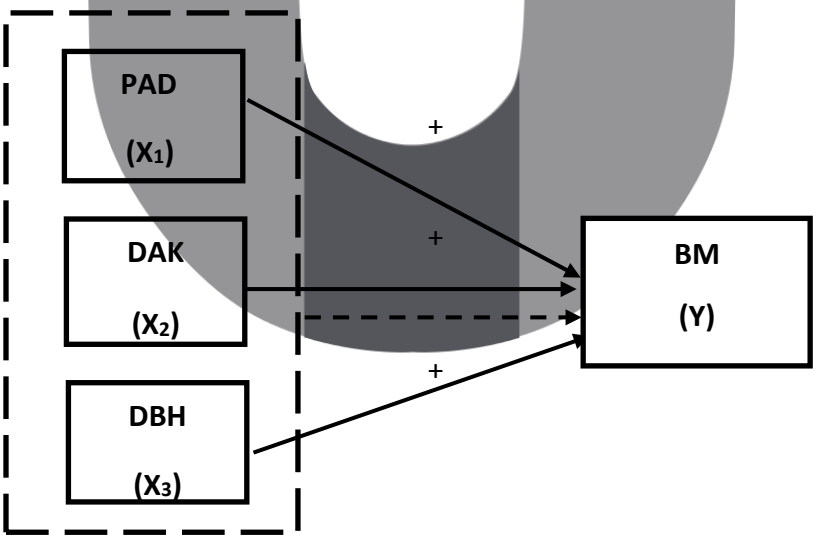

Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Sumber: data diolah peneliti, 2021

Keterangan:

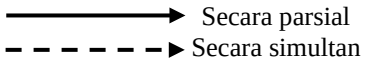

2.3 Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenik analisis regresi data panel untuk menghitung besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, sedangkan variabel terikatnya adalah belanja modal. Penelitian ini akan mengolah data dengan waktu yang berbeda dari berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang disebut *cross section* dengan objek penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 19 Kabupaten/Kota. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016–2020. Berdasarkan hal tersebut, maka model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta 1PAD + \beta 2DAK + \beta 3DBH + e$$

Keterangan :

BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi Variabel
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
e	: *Errorterm*

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

(dalam jutaan rupiah)

	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khu-sus	Dana Bagi Hasil	Belanja Modal
AVERAGE	Rp. 458.618	Rp. 353.620	Rp. 112.163	Rp. 442.778
MIN	Rp. 66.385	Rp. 79.090	Rp. 54.648	Rp. 115.153
MAX	Rp. 1.414.407	Rp. 766.455	Rp. 366.226	Rp. 1.039.413
STD DEV	Rp. 274.776	Rp. 178.528	Rp. 71.813	Rp. 210.489

Sumber: Data yang diolah Penulis (2021)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil memiliki nilai mean yang lebih besar dibanding nilai standar deviasi. Artinya data bersifat tidak bervariasi dan berkelompok (*homogen).*

3.2 Analisi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian tiga model regresi data panel (uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange-Multiplier), maka model random effect adalah yang paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pengujian model random effect:

Tabel 2
Hasil Uji Signifikasi Random Effect

Dependent Variable: BM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/07/21 Time: 21:10
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.37E+11	6.54E+10	3.624259	0.0005
PAD	-0.250546	0.083030	-3.017540	0.0033
DAK	0.432958	0.150198	2.882584	0.0049
DBH	1.342650	0.489773	2.741373	0.0074

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	1.16E+11	0.4173
Idiosyncratic random	1.38E+11	0.5827

Weighted Statistics

Root MSE	1.38E+11	R-squared	0.179382
Mean dependent var	1.96E+11	Adjusted R-squared	0.152328
S.D. dependent var	1.53E+11	S.E. of regression	1.41E+11
Sum squared resid	1.82E+24	F-statistic	6.630662
Durbin-Watson stat	1.408724	Prob(F-statistic)	0.000422

Unweighted Statistics

R-squared	0.274960	Mean dependent var	4.20E+11
Sum squared resid	3.19E+24	Durbin-Watson stat	0.802693

Sumber : Hasil Output Eviews 11 (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji *random effect model* (REM), dapat diketahui persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

Y = 2.37E+11 + -0.250546 X1 + 0,432958 X2 + 1,342650 X3 + e

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Koefisien konstanta sebesar 2.37E+11 yang berarti jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil bernilai konstan dan 0, maka variabel Belanja Modal akan bernilai 2.37E+11
2. Nilai koefesien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -0.250546 maka, apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau 0, maka Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar -0.250546.
3. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,432958 maka, apabila Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau 0, maka Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar -0,432958.
4. Nilai koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil sebesar 1,342650 maka, apabila Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau 0, maka Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 1,342650.

3.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Weighted Statistics

Root MSE	1.38E+11	R-squared	0.179382
Mean dependent var	1.96E+11	Adjusted R-squared	0.152328
S.D. dependent var	1.53E+11	S.E. of regression	1.41E+11
Sum squared resid	1.82E+24	F-statistic	6.630662
Durbin-Watson stat	1.408724	Prob(F-statistic)	0.000422

Unweighted Statistics

R-squared	0.274960	Mean dependent var	4.20E+11
Sum squared resid	3.19E+24	Durbin-Watson stat	0.802693

Sumber : Hasil Output Eviews 11 (data yang telah diolah)

Pengujian secara simultan digunakan untuk megetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian simultan dalam penelitian ini:

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai *prob. (F-statistic)* sebesar 0,000422 < 0,05. Hal ini mengartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Belanja Modal.

3.4 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4
Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

Dependent Variable: BM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/07/21 Time: 21:10
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.37E+11	6.54E+10	3.624259	0.0005
PAD	-0.250546	0.083030	-3.017540	0.0033
DAK	0.432958	0.150198	2.882584	0.0049
DBH	1.342650	0.489773	2.741373	0.0074

Sumber : Hasil Output Eviews 11 (data yang telah diolah)

Pengujian secara parsial digunakan apakah variabel-variabel independen dapat secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pengujian parsial dalam penelitian ini

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan dapat disimpulakan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0033 lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05) dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,250546. Hal ini mengartikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima serta secara parsial variabel Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0049 lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05) dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,432958. Hal ini mengartikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima serta secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
3. Dana Bagi Hasil memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0074 lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05) dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,342650. Hal ini mengartikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima serta secara parsial variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:
   a. Belanja modal memiliki rata-rata sebesar Rp. 419,775,452,696 sedangkan hasil dari standar deviasinya sebesar Rp. 216,200,482,761. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dalam penelitian ini tidak bervariasi atau berkelompok.
   b. Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar Rp. 484,646,628,021 sedangkan hasil nilai standar deviasinya sebesar Rp. 327,312,827,869 Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini tidak bervariasi atau berkelompok.
   c. Dana Alokasi Khusus memiliki rata-rata sebesar Rp. 353,589,946,147 sedangkan hasil nilai standar deviasinya sebesar Rp. 176,651,602,061. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini tidak bervariasi atau berkelompok.
   d. Dana Bagi Hasil memiliki rata-rata sebesar Rp. 112,591,984,755 sedangkan hasil nilai standar deviasi sebesar Rp. 73,998,755,913. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini tidak bervariasi atau berkelompok.

2. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang terdaftar di Badan Pusat Statistik. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 15,23% dan sisanya yaitu 84,77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dlam penelitian ini.
3. Secara parsial variabel variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh sebagai berikut:
   a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang terdaftar di Badan Pusat Statistik, artinya bahwa rendahnya Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan kurang mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah secara maksimal terhadap Belanja Modal. Sehingga Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang terdaftar di Badan Pusat Statistik, artinya bahwa tingginya dana alokasi khusus akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus sudah mampu mengelola secara maksimal terhadap Belanja Modal. Sehingga Dana Alokasi Khusus mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
c. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Badan Pusat Statistik selama periode 2016-2020, artinya tingginya dana bagi hasil akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan dana bagi hasil sudah mampu mengelola secara maksimal terhadap Belanja Modal. Sehingga Dana Bagi Hasil mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal

Referensi

[1] bps.go.id. (2019). *Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,17 Persen*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
[2] Kemendagri. (2004). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
[3] Syukriy Abdullah. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
[4]Verawaty, V. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E- Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 92–107. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.172